

Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia

Muhammad Abror Rosyidin
muhammadabror@umbasy.ac.id
Universitas Hasyim Asy'ari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemikiran Liberalisme dan Konservatisme Islam Indonesia, dari sejarah, perkembangan hingga pemikiran tokoh-tokohnya. Perkembangan pemikiran Islam semakin berwarna, maka kedua corak ini selalu menjadi perdebatan Panjang di kalangan umat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur dengan analisis data deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut, dapat dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa Islam Liberal di Indonesia digawangi oleh tokoh-tokoh Jaringan Islam Liberal. Liberalisme Islam di Indonesia mempunyai empat corak, yaitu corak progresif, radikal, moderat, dan alternatif. Kaum konservatisme Indonesia dibagi jadi dua corak umum, yaitu kelompok yang mengalami peningkatan amal ibadah atau ritual sejak dari yang wajib sampai sunah yang merupakan gejala yang diekspresikan mayoritas kaum Muslimin Indonesia. Kedua, kelompok yang mengalami kebangkitan konservatisme di kalangan kaum muslim Indonesia secara lebih ketat. Kelompok yang kedua ini, mempunyai subkelompok yang banyak dan berbeda-beda.

Kata kunci: *Liberalisme, Konservatisme, Kajian Islam, Islam Indonesia*

Abstract

This study aims to discuss the thoughts of Liberalism and Indonesian Islamic Conservatism, from history, and development to the thoughts of the characters. The development of Islamic thought is increasingly colorful, so these two styles have always been a long debate among Muslims. This study used a qualitative approach to literature study with analytical descriptive data analysis. From this research, it can be concluded that Liberal Islam in Indonesia is fronted by Liberal Islam Network figures. Islamic liberalism in Indonesia has four features, namely progressive, radical, moderate, and alternative. Indonesian conservatives are divided into two general patterns, namely groups that have experienced an increase in acts of worship or rituals

starting from the obligatory to the sunnah which are symptoms expressed by the majority of Indonesian Muslims. Second, groups experiencing a resurgence of conservatism among Indonesian Muslims are more stringent. This second group has many different subgroups.

Keyword: *Liberalism, Konservatifisme, Islamic Studies, Indonesian Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran keagamaan, khususnya pemikiran Islam di Negeri ini memang tidak pernah berhenti, dan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran keagamaan yang terjadi di Amerika maupun jazirah Arab. Misalnya, di Amerika telah lama berkembang pemikiran keagamaan yang mengarah kepada *rekontekstualisasi* yaitu melakukan penafsiran ulang terhadap doktrin agama, pikiran tentang perlunya dialog antar agama, dialog intrareligius dan dialog praksis, sementara di Eropa telah berkembang pemikiran keagamaan yang sangat radikal yaitu pikiran tentang perlunya *reaktualisasi* atau penyegaran dan pembaruan terhadap pemikiran keagamaan khususnya dikalangan Katolik dan Protestan. Selain itu dalam kalangan Islam terdapat beberapa pemikir yang turut mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam. Salah satunya, ada Fazlurrahman intelektual Pakistan yang terkenal dengan pemikiran Neo Modernismenya (Zuly Qodir 2007, 47–48). Secara bahasa, Neo Modernisme yaitu suatu paham yang beranggapan bahwa ajaran agama itu memang sempurna tetapi, untuk aktualisasinya diperlukan metode dan cara sehingga, suatu agama tetap aktual dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Neo-modernisme merasa bahwa ada kondisi krisis, antara Islam dan moderatisme, serta tradisionalisme dan fundamentalisme, maka perlu digaungkan pendekatan baru dalam keagamaan (Hamsah dan Nurchamidah 2019, 1).

Dalam Islam Neo Modernisme, merupakan suatu gerakan progresif dalam pemikiran Islam yang timbul dari Modernisme Islam. Tetapi, juga tertarik pada pengetahuan tradisional. Neo Modernisme mengajukan argumen bagi diterimanya pendekatan yang bersifat *holistik* (Secara menyeluruh, bersifat keseluruhan) terhadap ijtihad. Ia (mengacu kepada Neo Modernisme) mengambil informasi dari pengetahuan klasik dan juga pemikiran kritis Barat modern dengan maksud untuk dapat melihat pesan utuh Al-Qur'an dan penerapannya dalam masyarakat modern.

Paham ini juga mengajukan argumen bagi suatu pemahaman Islam yang progresif dan liberal, yang menerima Pluralisme masyarakat modern (Barton 2006, 20).

Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia juga berkembang pemikiran Islam yang bisa dikategorikan sebagai pemikiran Islam yang cenderung modern yaitu pemikiran Islam yang disebut dan dikenal dengan sebutan Islam Liberal. Islam liberal merupakan mazhab baru dalam pemikiran Islam di Indonesia. Kelompok Islam ini sepertinya merupakan kelompok yang berusaha melakukan interpretasi baru terhadap doktrin agama (Islam) yaitu al-Qur'an dan Sunnah/Hadith, serta interpretasi atas sejarah sosial dan konteks masyarakat Islam berdasarkan ilmu, bahasa, kritik sejarah dan studi ilmu-ilmu sosial (Zuly Qodir 2007, 45–46).

Paham Liberalisme sendiri berasal dari Barat. Liberalisme merupakan suatu aliran pikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat serta kemampuannya sebebaskan mungkin (Tim Penyusun 1990, 376). Ketika berbicara tentang Liberalisme, maka tidak dapat dilepaskan dari adanya paham Sekularisme. Begitupun adanya Sekularisme sangat erat hubungannya dengan Modernisme. Paham Sekularisme ini adalah merupakan paham yang menghendaki pemisahan antara agama dan Negara. Dan Modernisme sendiri, dalam masyarakat Barat Modernisme mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham dan institusi-institusi lama untuk disesuaikan dengan suasana baru, dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman (Nasution 1995, 181). Dalam dunia Islam salah satu Negara yang mengalami modernisasi adalah Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Attaturk. Sehingga, Turki yang awalnya merupakan Negara dengan sistem kekhalifahan berubah menjadi Negara Sekuler.

Namun, sebaliknya, ada gerakan pemikiran kuno dalam Islam yang masih diperhatikan, mereka masih berpikir tradisional terhadap perkembangan pemikiran Islam, termasuk pemikiran neo-modernisme atau liberalisme. Kelompok ini disebut konservatif, yang berpikiran mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tradisional. Kelompok ini berbeda dengan fundamentalisme yang cenderung ingin kembali kepada ajaran-ajaran lama.

PENJELASAN OBYEK KAJIAN

Pengertian Liberalisme Islam

Paham liberalisme sendiri berasal dari Barat. Liberalisme merupakan suatu aliran pikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat serta kemampuannya sebeb mungkin (Tim Penyusun 1990, 376). Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme juga bisa didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum (Coady 1995, 440).

Secara etimologi, Liberalisme (dalam bahasa Inggris Liberalism) adalah derivasi dari kata liberty (dalam bahasa Inggris) atau liberte (dalam bahasa Perancis) yang berarti “bebas”. “Liberal” diambil dari bahasa Latin liber yang berarti kebebasan, bukan perbudakan atau keadaan dimana seseorang dibebaskan dari kepemilikan orang lain. Makna kebebasan kemudian menjadi sikap masyarakat kelas terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berpikir (liberalisme lama) (Rahmat 2016, 71).

Dalam politik, liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu yang dianggap sebagai hak dalam pemerintahan, termasuk penghormatan terhadap persamaan hak, hak untuk berekspresi dan bertindak, dan hak untuk tidak terikat oleh agama atau ideologi (Blackburn 1996, 32). Dalam konteks sosial, liberalisme didefinisikan sebagai etika sosial yang membela kebebasan dan kesetaraan. Menurut Alonzo L. Hamby, Profesor sejarah di Universitas Ohio, liberalisme adalah ideologi ekonomi dan politik yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan (Zarkasyi 2016, 2–3).

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama (Sukarna 1981, 31). Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.

Adapun secara terminologi, para peneliti mengemukakan bahwa Liberalisme adalah terminologi yang cukup sulit untuk didefinisikan. Hal itu karena konsep liberalisme yang terbentuk tidak hanya dalam satu generasi, dengan tokoh pemikiran yang bermacam-macam dan orientasi yang berbeda-beda. Dalam *al-Mawsû'ah al-Falsafiyah al-Arabiyah* dikatakan, Liberalisme termasuk terminologi yang samar, karena

makna dan penegasannya senantiasa berubah-ubah dalam bentuk yang berbeda dalam sepanjang sejarahnya (Ziyadah 1988, 21:247).

Maka, pemaknaan Liberalisme Islam, dapat disebut sebagai paham penafsiran terhadap ajaran Islam yang berlandaskan atau dilandaskan pada nilai-nilai liberal (bebas). Golongan orang yang menganut aliran pemikiran ini, disebut Islam Liberal, atau muslim liberalis. Di Indonesia organisasi yang menghimpun para pemikir Islam liberal ada Jaringan Islam Liberal.

Pengertian Konservatisme Islam

Lawan dari Liberalisme ada paham konservatisme. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *conservāre*, melestarikan; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Konservatif berarti kolot dan bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. ("Lema 'Konservatif' - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia" t.t.) Dalam bidang politik, konservatisme merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal (Tim Pusat Bahasa 2007, 802).

Konservatisme kadang disamaartikan dengan fundamentalisme, padahal keduanya berbeda. Konservatisme lebih pada memegang teguh, menjaga, dan mempertahankan tradisi. Sementara fundamentalisme, aliran pemikiran yang selalu ingin kembali kepada ajaran asli dan murni. Kecenderungan fundamentalis ingin merealisasikan nilai-nilai agama secara utuh sesuai yang tertuang dalam teks (Syamsi 2014, 76).

Bruinessen mendefinisikan Islam konservatif sebagai "berbagai aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif, dan cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku". Islam konservatif juga dibedakan dari Islam fundamentalis, yakni gerakan atau aliran yang mengajak kembali kepada sumber ajaran Islam yang mendasar, yakni Alquran dan hadis. Gerakan konservatif juga berbeda dari gerakan "Islamis" yang didefinisikan sebagai gerakan yang mendukung gagasan Islam sebagai sebuah sistem politik dan berjuang untuk mendirikan negara Islam (Bruinessen 2013, 16–17).

PERKEMBANGAN LIBERALISME DAN KONSERVATISME ISLAM

Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Liberalisme

Sejarahnya paham liberalisme ini berasal dari Yunani kuno, salah satu elemen terpenting dari peradaban Barat. Namun, jika dilacak hingga Abad Pertengahan, liberalisme dipicu oleh kondisi sistem ekonomi dan politik yang didominasi oleh sistem feodal. Di dalam sistem ini, raja dan bangsawan memiliki hak-hak istimewa, sedang kan rakyat jelata tidak diberi kesempatan secara leluasa untuk menggunakan hak-hak mereka, apalagi hak untuk ikut serta dalam mobilisasi sosial yang dapat mengantarkan mereka menjadi kelas atas.

Perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215, ketika Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Charta, dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja kepada bangsawan bawahan. Charta ini secara otomatis telah membatasi kekuasaan Raja John sendiri dan dianggap sebagai bentuk liberalisme awal (*early liberalism*). Liberalisme awal sendiri ditandai dengan perlawanan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah yang cenderung absolut.

Perkembangan liberalisme selanjutnya ditandai oleh revolusi tak berdarah yang terjadi pada tahun 1688 yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Glorious Revolution of 1688* (Zarkasyi 2016, 3). Revolusi ini berhasil menurunkan Raja James II dari Inggris dan Irlandia, serta mengangkat William II dan Mary II sebagai raja. Setahun setelah revolusi ini, parlemen Inggris menyetujui sebuah undang-undang hak rakyat (*Bill of Right*) yang memuat penghapusan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris.

Pada saat bersamaan, seorang filsuf Inggris, John Locke, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar (*natural right*) yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat opini, beragama, dan berbicara. Di dalam bukunya, *Two Treatises of Government* (1690), John Locke menyatakan, pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi.

Pandangan ini, setelah itu, mulai berkembang di Prancis dan Inggris pada abad ke-18-19 yang menekankan bahwa kebebasan individu menciptakan kemakmuran melalui perubahan dan inovasi dalam organisasi sosial. Gerakan kebebasan individu (liberalisme) kemudian menyebar ke berbagai bidang, seperti

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Liberalisme lahir dari sistem kekuatan sosial berupa merkantilisme, feodalisme, dan Gereja Katolik Roma. Secara umum, liberalisme ingin meminimalkan campur tangan negara dalam kehidupan sosial. Liberalisme sebagai sebuah ideologi dapat dikatakan berasal dari filosofi humanis yang mempersoalkan kekuasaan gereja pada masa Renaisans, dan juga dapat dikatakan berasal dari golongan Huines yang ingin memiliki kekuasaan untuk memilih dan membatasi raja selama Revolusi Inggris (Batubara, Siregar, dan Siregar 2021, 485).

Gaya liberalisme Jhone Locke menjadi dasar dan inspirasi libertarianisme yang dirintis oleh Alexis de Tocqueville, Friedrich von Hayek, dan Robert Nozick. Di sisi lain, gaya liberalisme lain digaungkan oleh Jean Jacques Rousseau, yang berpendapat bahwa pemerintah harus terus berfungsi untuk melindungi pelaksanaan kebebasan individu rakyat. Model liberal ini mengilhami munculnya liberalisme egaliter, yang tokoh-tokohnya termasuk John Rawls dan Ronald Dworkin. Liberalisme ini berusaha untuk menyatukan ide-ide kebebasan dan kesetaraan individu dalam masyarakat. Pemerintah perlu mendistribusikan kembali nilai sosial untuk mewujudkan dan mewujudkan kebebasan dan kesetaraan individu dalam masyarakat.

Di bidang ekonomi, liberalisme berkembang melalui kebijakan *laissez faire* seorang ekonom Skotlandia, Adam Smith, di dalam bukunya, *The Wealth of Nations* (1776). Di kemudian hari, gagasan-gagasan ekonomi Adam Smith ini dijadikan dasar untuk membangun sistem ekonomi kapitalis yang menawarkan liberalisasi kegiatan ekonomi bagi setiap orang. Kebijakan ini akhirnya membatasi negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi rakyat.

Puncak liberalisasi politik terjadi pada abad ke 19 ketika di beberapa negara Eropa paham liberalisme terus menggelinding dalam bentuk ide-ide kebebasan dan gerakan-gerakan revolusioner. Akibatnya tahun 1830 banyak raja dan bangsawan Eropa yang kehilangan kekuasaan mereka. Pada tahun 1848, banyak negara berhasil memperjuangkan hak-hak sipil, meskipun sedikit sekali yang berubah menjadi negara demokrasi. Pada tahun-tahun itu pula hampir seluruh negara Eropa berhasil menghapuskan sistem perbudakan. Sedangkan tahun 1865 Amerika Serikat melakukan amandemen ke-13 pada Konstitusi Negara itu untuk menghapuskan

perbudakan. Amandeman ke-15 yang kemudian diadopsi pada tahun 1870 memberikan hak pilih kepada para budak. Sejak tahun 1800-an pula, para pekerja memperoleh hak-hak politiknya.

Menginjak abad ke 20 setelah berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918, beberapa negara Eropa menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi. Hak kaum perempuan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di dalam pemerintahan. Menjelang tahun 1930-an, liberalisme mulai berkembang tidak hanya meliputi kebebasan berpolitik, tetapi juga mencari kebebasan di bidang lainnya; misalnya ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan empat kebebasan, yakni kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*). Pada tahun 1948, PBB mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* yang menetapkan sejumlah hak ekonomi dan sosial, di samping hak politik.

Dari sini dapat dipahami, sejak tahun 1900-an, politik dan ekonomi liberal memiliki hubungan yang sangat erat. Gagasan ekonomi liberal didasarkan pada sebuah pandangan bahwa setiap individu harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya tanpa ada intervensi dan campur tangan dari negara. Kaum liberal percaya, bahwa ekonomi akan melakukan regulasi sendiri (*the invisible hand*). Atas dasar itu, campur tangan negara tidak diperlukan lagi. Gagasan semacam ini diadopsi dari pemikiran- pemikiran Adam Smith dan menjadi landasan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di dunia saat ini.

Jika ditilik dari perkembangannya liberalisme secara umum memiliki dua aliran utama yang saling bersaing dalam menggunakan sebutan liberal. Yang pertama adalah *liberal classic* atau *early liberalism* yang kemudian menjadi liberal ekonomi yang menekankan pada kebebasan dalam usaha individu, dalam hak memiliki kekayaan, dalam polesi ekonomi dan kebebasan melakukan kontrak serta menentang sistem *welfare state*. Kelompok ini mendukung persamaan (*equality*) di depan hukum tapi tidak dalam ekonomi (*economic inequality*) karena distribusi kekayaan oleh negara tidak menjamin kemakmuran. Persaingan dalam pasar bebas menurut kelompok ini lebih menjamin.

Yang kedua adalah liberal sosial. Aliran ini menekankan peran negara yang lebih besar untuk membela hak-hak individu (dalam pengertian yang luas), seringkali dalam bentuk hukum anti-diskriminasi. Kelompok ini mendukung pendidikan bebas untuk umum (universal education), dan kesejahteraan rakyat, termasuk jaminan bagi penganggur, perumahan bagi tunawisma dan perawatan kesehatan bagi yang sakit, semua itu didukung oleh sistem perpajakan. Dengan kata lain liberalisme awal (early liberalism) lebih menekankan pada hak-hak ekonomi dan politik.

Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti independen secara intelektual, berpikiran luas, terus terang, dan terbuka. Kebebasan intelektual sejatinya berkembang sejalan dengan perkembangan liberalisme sosial dan politik yang terjadi di Barat pada akhir abad ke 18, namun akar-akarnya dapat dilacak seabad sebelumnya yaitu abad ke 17. Di masa itu dunia Barat terobsesi untuk membebaskan bidang intelektual, keagamaan, politik dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan. Maka dari itu prinsip-prinsip Revolusi Perancis 1789 dianggap sebagai *Magna Charta* liberalisme. Di dalamnya terdapat kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepercayaan, berbicara, pers dan politik. Konsekuensinya adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan; penyingkiran agama dari kehidupan publik menjadi bersifat individual. Selain itu agama Kristen dan Gereja harus dihindarkan agar tidak menjadi lembaga hukum ataupun sosial. Yang jelas liberalisme mengindikasikan peningkaran terhadap semua otoritas yang sesungguhnya, sebab otoritas dalam pandangan liberal menunjukkan adanya kekuatan di luar dan di atas manusia yang mengikatnya secara moral (Zarkasyi 2016, 6–7).

Kebebasan intelektual yang mencoba untuk bebas dari agama dan dari Tuhan itu secara logis merupakan liberalisme dalam pemikiran keagamaan dan itulah yang pertamakali dirasakan oleh agama-agama di Barat. Liberalisme dalam pemikiran keagamaan atau yang terkenal dengan *theological liberalism* berkembang melalui tiga fase perkembangan. Fase *pertama* dari abad ke 17 yang dimotori oleh filsuf Perancis Rene Descartes yang mempromosikan doktrin rasionalisme atau *Enlightenment* yang berakhir pada pertengahan abad ke 18. Doktrin utamanya adalah a) percaya pada akal manusia b) keutamaan individu c) imanensi Tuhan dan d) meliorisme

(percaya bahwa manusia itu berkembang dan dapat dikembangkan). Fase *kedua* bermula pada akhir abad ke 18 dengan doktrin Romanticisme yang menekankan pada individualisme, artinya individu dapat menjadi sumber nilai. Kesadaran-diri (*self-consciousness*) itu dalam pengertian religious dapat menjadi Kesadaran-Tuhan (*god-consciousness*). Tokohnya adalah Jean-Jacques, Immanuel Kant, dan Friedrich Schleiermacher.

Fase terakhir bermula pada pertengahan abad ke 19 hingga abad ke 20 ditandai dengan semangat modernisme dan postmodernisme yang menekankan pada ide tentang perkembangan (*notion of progress*). Agama kemudian diletakkan sebagai sesuatu yang berkembang progressif dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern serta diharapkan dapat merespon isu-isu yang diangkat oleh kultur modern. Itulah sebabnya maka kajian mengenai doktrin- doktrin Kristen kemudian berubah bentuk menjadi kajian psikologis pengalaman keagamaan (*psychological study of religious experience*), kajian sosiologis lembaga-lembaga dan tradisi keagamaan (*sociological study of religious institution*), kajian filosofis tentang pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan (*philosophical inquiry into religious knowledge and values*) (Chartier 2004, 693).

Sementara itu, pada abad ke-19 , liberalisme dalam pemikiran keagamaan Katolik Roma mengambil bentuk yang mendukung demokrasi politik dan reformasi tetapi secara teologis menganut ortodoksi. Sedangkan dalam pemikiran Kristen Protestan, terdapat kecenderungan terhadap kebebasan intelektual yang menempatkan substansi etis dan kemanusiaan Kristen serta mereduksinya menjadi teologi dogmatis (Masgono 2010).

Ketika liberalisme memasuki pemikiran keagamaan, banyak konsep dasar kekristenan yang berubah. Nicholas F. Gier, dari University of Idaho, Moscow, Idaho merangkum ciri-ciri pemikiran tokoh-tokoh liberal di Amerika Serikat sebagai: Pertama, percaya pada Tuhan, tetapi bukan Tuhan dalam kepercayaan Kristen ortodoks. Karena Tuhan mereka tidak orthodox maka mereka seringkali disebut Atheist. Ciri-ciri Tuhan menurut kitab suci dan doktrin sebagai pribadi dengan ciri-ciri tertentu adalah oleh kelompok liberal karena mereka lebih menyukai konsep ketuhanan yang diambil dari akal manusia. Tuhan dalam kepercayaan ini dianggap tidak mengetahui kehidupan manusia secara detail dan tidak mencampuri urusan individu manusia. *Kedua*, kaum liberal memisahkan antara

doktrin Kristen dan etika Kristen. Dengan mengurangi penekanan pada doktrin atau mereka menganut prinsip bahwa orang Kristen dan non-Kristen menerima dan saling menguntungkan

Ketiga, kaum liberal tidak ada yang percaya pada doktrin Kristen Orthodox. Mereka menolak sebagian atau keseluruhan doktrin-doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, perawan yang melahirkan, Bible sebagai kata-kata Tuhan secara literal, takdir, neraka, setan dan penciptaan dari tiada. Doktrin satu-satunya yang mereka percaya, selain percaya akan adanya Tuhan adalah keabadian jiwa. *Keempat*, menerima secara mutlak pemisahan gereja dan negara. Para pendiri negara Amerika menyadari akibat dari pemerintahan negara-negara Eropa yang memaksakan doktrin suatu agama dan menekan agama lain. Maka dari itu kata-kata “Tuhan” dan “Kristen” tidak terdapat dalam undang-undang. Ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama liberal dalam konvensi konstitusi tahun 1787. *Kelima*, percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama.

Dengan demikian, liberalisme sosial dan politik dalam peradaban meminggirkan agama atau secara perlahan memisahkan agama dari urusan sosial dan politik. Agama tidak diberi tempat di atas kepentingan sosial dan politik. Dan ketika liberalisme memasuki pemikiran keagamaan Kristen Katolik dan Protestan, ia telah menundukkan Gereja pada kekuatan politik dan humanisme, serta mereduksi kekuatan teologi di semua bidang. Oleh karena itu, dalam liberalisme pemikiran keagamaan, pertanyaan pertama yang harus diinterogasi adalah konsep Tuhan, doktrin atau dogma agama. Setelah itu, liberalisme mempersoalkan dan kemudian memisahkan hubungan agama dari politik. Terakhir, liberalisme pemikiran keagamaan menjadi dan dipicu oleh gelombang postmodernisme yang membela pluralisme, kesetaraan dan relativisme (Gier 1980, 45).

Perkembangan Liberalisme Islam di Indonesia

Paham Liberalisme ke Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari adanya Kolonialisme Barat terhadap Indonesia. Penjajahan begitu panjang dilakukan oleh Barat terhadap Negara Indonesia memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini, terutama pada masa kolonial Belanda. Prinsip Negara sekular telah

termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama (Suminto 1986, 27).

Politik Etis yang dijalankan penjajah Belanda di awal abad XX semakin menancapkan Liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu disebut *unifikasi*, yaitu upaya mengikat Negeri jajahan dengan penjajahnya dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck Hurgronje, menjadi cara yang manjur dalam proses *unifikasi* agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama (Noer 1991, 183).

Masuknya paham sekular ini ke Indonesia, dapat dimengerti mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial dapat tumbuh subur di Indonesia, baik Liberalisme di bidang politik, ekonomi, atau pun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem *Kapitalisme (economic liberalism)*, yaitu sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan adanya kepemilikan pribadi (*private ownership*), perekonomian pasar (*market economy*), persaingan (*competition*), dan motif mencari untung (*profit*). Dalam bidang agama, Liberalisme mewujud dalam Modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus. Dalam bidang politik, Liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat (Al-Jawi, t.t.).

Lahirnya sebuah gerakan yang terbentuk pada tanggal 8 Maret 2001 yang menamakan dirinya Jaringan Islam Liberal (JIL), para pelopornya adalah intelektual muda yaitu Ulil Abshar Abdalla, Luthfie Assyaukani, Hamid Basyaib dan beberapa tokoh lainnya. Keberadaan gerakan ini bisa dikatakan merupakan aktualisasi dari adanya pemikiran Islam yang bersifat liberal. Terbentuknya gerakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia yang nota bene dianggap suatu aliran yang sesat dan menyesatkan, karena dianggap tidak bersesuaian dengan akidah Islam yang sesungguhnya. Kemunculan JIL ini tidak bisa dilepaskan oleh tokoh penting yaitu Nurcholis Majid yang pernah meluncurkan gagasan sekularisasi, ia dianggap sebagai tokoh pelopor Gerakan pemikiran

Islam. Meskipun sebenarnya Nurcholis Majid sendiri mengatakan tidak pernah menggunakan "istilah" Islam liberal untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran Islamnya, tetapi ia juga tidak menentang ide-ide Islam Liberal (Husaini dan Hidayat 2002, 4).

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada Nurcholis Majid dan juga KH. Abdurrahman Wahid yang dianggap sebagai tokoh penting, atas bangkitnya gerakan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya pemikiran yang Liberal. Selain itu, keduanya dianggap sebagai tokoh yang sepaham dengan kalangan JIL. walaupun sebenarnya kedua tokoh tersebut tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang Liberal, dan juga tidak bersangkut paut dengan JIL.

Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa, akar yang menjadikan semangat atas terbentuknya JIL ini adalah gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid. Walaupun antara generasi pertama melalui para pelopornya yaitu, pada masa Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid, dan generasi kedua, yaitu pada masa Ulil Abshar Abdalla dan seterusnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi isi. Namun, diantara kedua generasi ini masih dapat dibedakan, yaitu pada generasi pertama dalam melakukan pembaruan terhadap pemikirannya di Indonesia kekuatan lebih kepada personal-individual sedangkan, pada generasi selanjutnya (Ulil Abshar Abdalla, dkk) sudah terbentuk sebuah jaringan (JIL), yang artinya kekuatannya lebih kepada kekuatan kolektif (Rahman 2010, 35).

Karena itu, Islam Liberal sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan gagasan-gagasan Islam yang telah dikembangkan oleh Nurcholis Majid dan kelompoknya. Yaitu kelompok yang tidak menghendaki diberlakukannya syariat Islam, memperjuangkan sekularisasi, emansipasi wanita, menyamakan agama Islam dengan agama yang lain (Pluralisme teologis) serta memperjuangkan demokrasi ala Barat (Rahman 2010, 3).

Jaringan Islam Liberal, adalah forum intelektual terbuka yang mendiskusikan dan menyebarkan Liberalisme Islam di Indonesia. Forum ini bersekretariat di Teater Utan Kayu, Jalan Utan Kayu no. 68 H, Jakarta, pada sebidang tanah milik jurnalis dan intelektual senior Goenawan Mohammad. Kemudian, sekitar bulan Februari 2001 Goenawan Mohammad mengundang para tokoh muda yang konsern terhadap

gerakan pembaruan, ke Teater Utan Kayu, Jakarta dengan tujuan membicarakan isu seputar Islam Liberal. Adanya diskusi pada waktu itu, merupakan diskusi pertama dari serial diskusi bulanan dalam lingkaran komunitas Teater yang berjalan hingga saat ini. Kemudian, dari hasil diskusi tersebut telah disepakati untuk dibentuknya Jaringan Islam Liberal (JIL) (Rahman 2010, 31).

Perkembangan Konservatisme Islam di Indonesia

Martin Van Bruinessen menyebut beberapa penjelasan mengapa konservatisme muncul kembali di Indonesia. *Pertama*, hubungan antara demokratisasi dan memudarnya pengaruh pandangan-pandangan keislaman yang liberal dan progressif. Argumen ini menegaskan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia pada dasarnya konservatif atau cenderung mempunyai corak fundamentalis. Van Bruinessen tidak menerima penjelasan ini, karena alasan tersebut menandakan bahwa gagasan Islam liberal hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam sebuah sistem pemerintahan otoriter. Argumen ini juga menjelaskan bahwa para pendukung gagasan Islam liberal dan progresif yang sebelumnya aktif di dalam berbagai organisasi masyarakat madani kini aktif di politik praktis yang pada gilirannya menyebabkan dasar kebudayaan Islam liberal menjadi lemah.

Kedua, menguatnya pengaruh Timur Tengah. Alumni perguruan tinggi di Timur Tengah, terutama Saudi Arabia, menyebarkan corak pemahaman keislaman yang harāh dan skripturalis kepada masyarakat. Usaha ini sejatinya sudah dimulai sejak dua dekade terakhir abad yang lalu, dengan penerjemahan buku-buku agama dan membagikannya secara percuma kepada individu, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dengan dukungan dana yang memadai, terutama dari Saudi Arabia dan Yayasan *Ihya' al- Turath al-Islami* di Kuwait, para alumni Timur Tengah mendakwahkan corak keislaman ini dengan berbagai cara: mengadakan pengajian di masjid-masjid dan kantor-kantor, mendirikan madrasah dan pesantren, membangun radio dan televisi dakwah, dan menerbitkan buku dan majalah. Alumni ini bekerjasama dengan lulusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Islam (LIPIA), sebuah lembaga pendidikan tinggi di Jakarta sebagai cabang Universitas Imam Ibn Su'ud di Riyadh. Kajian yang dilakukan oleh Noorhaidi Hasan dan Din Wahid menunjukkan kuatnya pengaruh Timur Tengah ini.

Gerakan transnasional itu, menurut Van Bruinessen, dalam kadar tertentu, mengurangi otoritas keagamaan ormas-ormas Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai contoh, para pegiat dakwah Salafî tidak pernah merujuk kepada fatwa yang diberikan oleh ormas-ormas Islam tersebut di atas untuk masalah-masalah keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sebagai gantinya, mereka meminta fatwa langsung kepada guru-guru mereka di Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa para aktivis Salafî tidak mempercayai wewenang keagamaan ormas Islam Indonesia (Bruinessen 2013, 5–6).

Namun, sejatinya ada perbedaan pendapat antara perbedaan konservatisme dan fundamentalisme. Keduanya sering disamakan. Pemahaman fundamental lebih dekat dengan keinginan untuk memurnikan agama kembali kepada akarnya. Jika dikaitkan dengan Islam, tentu adalah Alquran dan Hadis Nabi SAW. Keinginan itu, tidak dibarengi dengan penerimaan terhadap golongan moderat yang digawangi oleh NU yang mengakomodir kedua sumber utama itu, dengan menambahkan dua lagi, Ijma' dan Qiyas. Ijma' adalah sumber penentuan dontrin agama, melalui konsensus ulama mayoritas, sedangkan Qiyas adalah analogi yang menimbang persoalan yang tidak ada dalam dalil Nash (Alquran dan Hadis), dengan persoalan yang sudah ada dalilnya dalam Nash. Orang lebih menyebut mereka dengan aliran puritan, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan aliran Salafi. Diskusi soal salafi ini juga akan menjadi lebih panjang, dan penuh perdebatan. Di Indonesia gerakan ini diwakili oleh aliran, semisal Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, dll. Hasil paling prestisius dari golongan ini, yaitu jihadisme, salafisme, wahabisme, khilafah, takfiri, dll.

Sementara lawannya adalah sinkretisme, di mana penerimaan terhadap budaya dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat lokal, maupun interlokal. Pertemuan budaya Islam dengan budaya lokal dan interlokal inilah yang akhirnya terjadi akulturasi dan asimilasi. Organisasi ini diwakili oleh NU yang sangat mengakomodir kebudayaan lokal dan penerimaan dalam kadar tinggi terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat.

Lalu di manakah posisi konservatisme? Petanya, aliran konservatif dapat terkait dengan aliran tradisionalisme, di mana mereka memang memegang kuat sikap

dan perilaku berdasarkan dasar-dasar agama. Islam tradisional merupakan model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada *khulafa' al-rasyidin*, sedang tradisional melebarkan sampai pada salaf al-shalih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Hasan Hanafi pernah mengkritik model pemikiran ini. Yaitu, bahwa tradisional akan menggiring pada eksklusifisme, subjektivisme dan determinisme. Islam tradisional selalu berdampingan dengan konservatif (Nizar 2002, 76).

Majlis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah dianggap merupakan representasi dari Islam Moderat, walau Muhammadiyah bersifat Puritan, tidak terlalu mengakomodir akulturasi dan asimilasi budaya dan tradisi lokal. Namun, Muhammadiyah menerima pemikiran modernisasi Islam, sehingga ada kecenderungan untuk bersikap moderat. Namun, ada pakar yang menyebut kedua organisasi ini juga punya kecenderungan konservatif. Bahkan MUI disebut sebagai golongan atau organisasi Puritan Moderat (Wahid 2014, 379). Seiring dengan perkembangan politik, Ichwan juga secara jeli melihat perubahan sikap keberagamaan MUI, yang disebutnya sebagai “Islam puritan moderat”. Sebutan “puritan moderat” sebenarnya bukan monopoli MUI semata. Banyak ormas Islam di Indonesia yang puritan tetapi moderat, seperti Muhammadiyah dan Persis. Bedanya, karena penekanan pada puritanisme, MUI terjebak ke dalam sikap konservatif. Perubahan sikap ini, menurut Nur Ichwan, salah satunya disebabkan oleh masuknya beberapa figur Muslim yang berasal dari garis keras, seperti Chalil Ridwan dan Adian Husaini ke dalam jajaran MUI sejak tahun 2000. Tokoh-tokoh ini menduduki beberapa tempat strategis dalam struktur MUI (Wahid 2014, 380).

Sikap ini biasanya dianut oleh mereka yang tengah menikmati posisi istimewa atau kekuasaan dalam sebuah struktur atau paling tidak merasa sangat diuntungkan oleh sistem yang ada. Mereka umumnya adalah kaum pemodal, penguasa, penjabat, dan kaki tangannya sebuah rezim. Kaum konservatif jumlahnya tak seberapa namun mereka adalah kekuatan dominan dalam sebuah sistem sosial

politik negara. Merekalah yang kemudian mengendalikan dan menjalankan sistem kekuasaan Negara untuk meraup untung dan menikmati kekuasaan. Agar kekuasaan mereka bertahan lama, kaum konservatif lebih cenderung mempertahankan dan melestarikan system yang sudah ada. Kalau pun mereka melakukan perubahan karena desakan dan dorongan luar, mereka hanya ingin perubahan itu tidak sama sekali menggeser atau menghilangkan posisi mereka dalam kekuasaan. Itupun, perubahan itu hanya mungkin terjadi bila situasi sudah sangat krisis dan mendesak yang memaksa mereka harus turun dari posisi kekuasaan. Hal itu bisa saja terjadi bila gerakan perlawanan demikian kuat, massif, dan terorganisir dalam sebuah bangsa.

Perubahan seperti ini yang pernah terjadi di negara ini ketika rezim orde baru ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa yang didukung oleh kaum cendikia dan masyarakat. Akan tetapi, perubahan itu hingga kini tidak membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sebab kaum konservatif kembali berkuasa dan bercokol dalam sistem kenegaraan di Indonesia (Doe 2011).

Kebangkitan golongan Konservatif di Indonesia semakin diperparah dengan adanya kontestasi politik, kampanye pemilihan presiden pada 2019 lalu. Kontestasi politik berubah menjadi pertarungan golongan dan kelompok. Di mana salah satu calon menjadi representasi dari golongan Islam tertentu. Beberapa kali melakukan aksi solidaritas yang berujung pada pembelaan terhadap satu pasangan calon. Ujaran kebencian, hinaan, dan ucapan SARA, terjadi di ruang publik, khususnya di media sosial.

Sebenarnya, sebelumnya ada peristiwa yang memicu bangkitnya kelompok ini, yaitu dugaan penghinaan Alquran oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mantan Gubernur DKI Jakarta yang dianggap menghina al-Maidah ayat 51. Mereka melakukan aksi solidaritas, dan menamaninya dengan gerakan 212, dan seterusnya aksi-aksi selanjutnya dinamai dengan nama serupa, seperti 212 Jilid 2, aks Bela Islam, Bela Ulama, GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) dan bahkan kemudian menggunakan nama Ijtima' Ulama sebagai legitimasi keabsahan fatwa mereka terhadap persoalan, khususnya dalam tataran perpolitikan. Golongan Ijtima' Ulama ini, ada juga Solidaritas Alumni 212, digawangi oleh FPI pimpinan Habib Rizieq Shihab yang dianggap sebagai Imam Besar Nasional. Tentu saja hal itu oleh golongan Islam moderat dan liberal dianggap terlalu lebay. Pada Mei 2020, FPI

dibubarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Farisa 2020).

Keberadaan mereka akan semakin kuat jika terus ditekan, semakin di tekan akan semakin besar. Misalkan saja saat DII/TII pimpinan Kartosoewiryo ditekan oleh pemerintah Soekarno, semakin besar, dan terus melawan. Gerakan konservatif, akhirnya dapat berubah menjadi gerakan separatisme dan terorisme. Pada masa Orde baru, misalnya, tekanan terhadap umat Islam oleh pemerintah rezim juga memicu meningkatnya gerakan konservatif, bahkan berujung kepada tindakan anarkisme, seperti pada peristiwa Tanjungpriok, di mana bentrokan masa besar menimbulkan korban meninggal dan kerusakan parah sejumlah bangunan. Tekanan demi tekanan terhadap umat Islam, juga dapat memicu gerakan besar di masa depan, karena luka lama akan terus dibawa-bawa dan dikaitkan sebagai upaya membuat semacam legitimasi publik, bahwa gerakan mereka adalah upaya untuk membela Islam dan umat, untuk menambah simpati umat Islam. Orde barulah yang paling bertanggungjawab atas ketegangan umat Islam dengan pemerintah, karena pembatasan gerak dan ibadah pada masa 32 tahun itu. Itulah embrio-embrio gerakan konservatif yang massif di era reformasi.

Macam dan Pemikiran Toloh Liberasime Islam di Indonesia

Pemikiran liberal di Indonesia memang dipelopori oleh organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL). Ciri dari Islam Liberal dapat dilihat dari cara penafsiran tertentu atas Islam dengan beberapa landasan yaitu, (1) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam, (2) mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks, (3) mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural, (4) memihak pada yang minoritas dan tertindas, (5) meyakini kebebasan beragama. Semua agama benar, dan (6) memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik (Sekulerisasi) (Ahmad 2004, 89–90).

Kelahiran organisasi ini menuai banyak pro dan kontra. Adanya pro dan kontra terhadap berdirinya jaringan ini bisa disimak dalam sebuah buku yang berjudul “Islam liberal dan Fundamentalis: sebuah pertarungan wacana”. Dalam buku ini,

memuat berbagai pro maupun kontra atau respon terhadap gagasan dan pemikiran Ulil Abshar Abdalla di Harian Kompas pada 18 Nopember 2002, yang berjudul “menyegarkan kembali pemahaman Islam”. Ulil menyebut bahwa Islam harus memiliki pemahaman kontekstual, nilai-nilai universalnya harus diterjemahkan ke dalam konteks tertentu, misalnya bahasa Arab, Melayu, Asia Tengah, dll. Tetapi bentuk-bentuk Islam yang dikontekstualisasikan hanyalah ekspresi budaya dan kita tidak wajib untuk mengikutinya. Aspek Islam yang mencerminkan budaya Arab, misalnya, tidak perlu diikuti. Misalnya, pertanyaan tentang jilbab potongan, qishas, tentang rajam, tentang janggut, tentang jubah hanya wajib diikuti, karena ini hanyalah ekspresi lokal dari islami dalam bahasa arab. Yang harus diikuti, adalah nilai-nilai universal yang mendasari praktik tersebut. Hijab pada dasarnya memakai pakaian yang memenuhi standar kesopanan masyarakat. Kesusilaan umum tentu saja fleksibel dan tergantung pada perkembangan budaya manusia” (Abdalla dan kawan-kawan 2003, 2). Sejak penerbitan artikel tersebut diatas, kemudian JIL mulai dikenal secara nasional.

Dalam tulisannya yang berjudul “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, Ulil Abshar Abdala menyatakan bahwa Islam adalah agama sejarah. Hal ini terungkap dalam kutipan tulisan tersebut, Ulil melataknkan Islam pertama-tama sebagai sebuah “organisme” yang hidup; sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai “patung” indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah.

JIL, dari kacamata salah satu pentolannya, Ulil Abshar Abdallah memahami bahwa penafsiran Islam harus dapat memisahkan berbagai unsur yang di dalamnya. Ia berpendapat bahwa dalam Islam terdapat kreasi budaya setempat (budaya Arab) dan juga nilai fundamental. Menurut Ulil, kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak. Dalam pandangan Ulil Abshar Abdala, aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab tidak usah diikuti, misalnya, soal jilbab, potong tangan, qishash, rajam, jenggot dan jubah merupakan cerminan budaya yang tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab dan bukan ajaran fundamental dari Islam itu sendiri (Abdalla 2002a).

Islam Liberal menganggap nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik Islam tersebut. Jilbab intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (*public decency*). Kepantasan umum tentu sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia. Larangan kawin beda agama, bagi Islam Liberal, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus “diamandemen” berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini. Menurut Ulil, tidak ada yang disebut "hukum Tuhan" dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai *maqashidusy syari'ah*, atau tujuan umum syariat Islam.

JIL menganggap masyarakat sekarang sebagai masyarakat pasca-wahyu, maksudnya sederhana: gambaran tentang Tuhan yang sibuk mengurus segala tetek bengek urusan manusia itu sudah tidak tepat lagi. Gambaran Tuhan sebagai sejenis “*Communiting God*” (Tuhan yang wira-wiri dari kahyangan ke bumi dan balik lagi) juga tidak bisa lagi diterima. Salah satu warisan (yang kebetulan jelek) dari era kewahyuan itu adalah penggambaran Tuhan sebagai “instansi” yang mendektekan secara detail apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia: Tuhan diandaikan sebagai “Bapak” yang tahu segala-galanya. Keyakinan seperti itu disebut mereka sebagai keyakinan para fundamentalis (Abdalla 2002b, 2).

Islam liberal memiliki beberapa corak atau tipologi. *Pertama*, liberal progresif. Tipologi liberal ini, lebih memperhatikan kondisi kultural yang ada, baik politik maupun keagamaan, mengenai keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan pluralisme. Liberal Progresif ini lebih disebut sebagai Islam Kiri, sebuah pemikiran yang ingin mentransformasikan masyarakat kepada arah keadilan. Kelompok dengan tipologi ini menganggap bahwa tidak ada lagi kesenjangan antara Islam dan negara. Umat Islam harus melakukan redefinisi terhadap perspektif politiknya terhadap negara. Islam bukan lagi musuh negara, tapi merupakan patner negara dalam mewujudkan negara berdaulat.

Tokoh-tokoh Liberal Progresif di Indonesia, ada Rashid Murtadlo, Muhammad Alfayyad, Alnick Nathan, dan lain-lain yang tergabung dalam jaringan Islam Progresif. Mereka mempunyai gerakan bernama Islam Bergerak. Pemikiran mereka sudah dipengaruhi oleh Marksisme dan Sosialisme. Kajian kesukaan mereka adalah agraria dengan memberikan advokasi agraria kepada rakyat tertindas yang kehilangan tanah. Muhammad Alfayyad menganggap, sudah saatnya menceraikan liberalisme Islam dari kata “progresif”. Baginya, kelemahan utama studi yang dilakukan oleh Martin van Bruinessen dkk dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme* (2014) adalah masih mempertahankan istilah ini untuk menggambarkan dinamika keterbukaan pada kelas menengah Muslim terdidik Indonesia terhadap ide-ide pembaruan Islam. Suatu kelemahan yang juga diulangi oleh Laode Ida baru-baru ini, yang melihat kebangkitan kaum moderat Nahdliyin sebagai produk dari “liberalisme politik” pasca-Reformasi (Al-Fayyadl 2015). Kelompok ini ingin memisahkan diri dari label Liberal, dan lebih suka disebut Islam Progresif, dari pada Islam Liberal Progresif (Zully Qodir 2012, 124).

Kedua, liberal radikal. Liberal yang satu ini berpikiran bahwa segala ketidakadilan yang terjadi disebabkan oleh status sosial yang timpang, baik dianut oleh negara maupun pribadi. Mereka mengutip istilah feminis, yaitu *Personal is Political*, yang maksudnya semua individu itu politis. Mereka menganut teologi pembebasan, yaitu paham berdasarkan paradigma sosial konflik, atau juga ada sisi pemikiran Marx yang dimodifikasi, sehingga muncul pola materialis dan ekonomis. Penganut metode pembebasan yang dianut oleh Liberal Radikal ingin membebaskan kaum lemah, termasuk perempuan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Agama, mereka arahkan kepada urusan-urusan seperti itu. Penganut kelompok ini kebanyakan adalah golongan feminis radikal, seperti Syarifah Sabaroedin (Zully Qodir 2012, 131–32).

Ketiga, liberal moderat. Kelompok ini tidak menginginkan Islam menjadi ideologi politik atau mencita-citakan Islam politik yang menuntut Islam ada dalam putaran politik di mana harus terlibat dalam pengambilan kebijakan negara secara langsung. Pemikiran ini merupakan kelanjutan dari neo-modernis yang diprakarsai oleh Gus Dur yang merupakan perintis Islam Progresif. Kaum liberal moderat menggunakan pendekatan filsafat perenial, yaitu melihat agama dari sisi yang substansial, yaitu mencari hal-hal yang bersifat universal dengan mengedepankan pendekatan apresiatif

terhadap paratikularitas bentuk-bentuk agama yang diwahyukan Tuhan. Di dalam konteks hubungan agama dan negara, kelompok Islam Liberal-Moderat berpandangan bahwa hubungan agama dan negara tidak lagi harus bersifat formalis-skriptualis, tetapi substansialis, sehingga negara tidak perlu menjadi sekuler (Zully Qodir 2012, 136–37).

Keempat, liberal transformatif. Terkadang kelompok ini disebut dengan liberal alternatif, cirinya mereka selalu mempertanyakan kembali atau meninjau ulang paradigma ideologi mainstream, dan cenderung ingin menemukan paradigma alternatif baru. Hal itu dimaksudkan untuk dapat menata ulang struktur dan superstruktur sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat didorong untuk menemukan solusi agar dapat melakukan perubahan sosial, serta menuntun rakyat menuju demokratis dalam sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Zully Qodir 2012, 149).

Macam dan Pemikiran Tokoh-Tokoh Konservatisme Islam Indonesia

Dilihat dari ciri-cirinya, konservatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu konservatif tradisional dan konservatif fundamentalis. Konservatif tradisional, merupakan golongan yang kuat dalam memegang tradisi lama dan sukar menerima perubahan modernisasi. Sementara konservatif fundamentalis, cenderung ingin mengembalikan dan memurnikan segala perubahan, dinamika sosial, ekonomi, politik kepada kemurnian ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi SAW. Ada beberapa ciri dari kelompok konservatif tradisional. *Pertama*, eksklusif (tertutup) atau fanatik sempit, tidak mau menerima pendapat, pemikiran dan saran dari kelompok lain (terutama dalam bidang agama). Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar.

Kedua, tidak dapat membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non ajaran. Dengan ciri demikian, mereka menganggap semua hal yang ada hubungannya dengan agama sebagai ajaran yang harus dipertahankan. *Ketiga*, terorientasi ke belakang. Mereka menilai bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Ini contoh konservatif tradisional. *Keempat*, cenderung tekstualis-literalis. Cenderung memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual tanpa melihat latar belakang serta situasi sosial yang menyebabkan ayat-ayat tersebut diturunkan, sehingga jangkauan pemakaian suatu ayat sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu saja tanpa mampu

menghubungkannya dengan situasi lain yang memungkinkan dijangkau oleh ayat tersebut.

Kelima, cenderung bersifat jabariyah dan teosentris, yaitu sikap pasrah, patuh dan tunduk pada Tuhan diiringi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu jika Tuhan mengizinkan akan terjadi. *Keenam*, jumud dan statis. Jumud adalah pikiran di mana tak bisa melihat sesuatu yang ada lebih luas lagi, dengan demikian islam tradisional cenderung tidak mau mengikuti perubahan dan mempertahankan apa-apa yang dipandang sudah baik sejak dahulu, tanpa mempertanyakannya secara kritis apakah apakah apa-apa yang mereka pertahankan itu masih cukup dan mampu bersaing dengan kekuatan lain (Nata 2001, 155).

Sedangkan ciri-ciri dari kelompok konservatif fundamentalis, yang dibawa oleh pemikir Salafi Wahabi dll, dalam bidang pendidikan yaitu, *pertama*, memaknai ilmu hanya terbatas pada pengetahuan tentang Tuhan. Tujuan pengetahuan adalah pengenalan Tuhan dan pemahaman terhadap perintah dan larangan-Nya. *Kedua*, memprioritaskan jenis pengetahuan yang diyakini bisa menunjang keluhuran moral dan kebahagiaan di akhirat. *Ketiga*, menganggap ilmu hanya untuk ilmu (Arif 2008, 108).

Sebenarnya cukup sulit untuk memberikan ciri-ciri umum kelompok konservatif, karena menurut Azyumardi Azra, corak Islam Konservatif di Indonesia berbeda-beda dan sama sekali berbeda satu sama lainnya. Untuk memahami fenomena kebangkitan dan pertumbuhan konservatisme agama di kalangan kaum Muslimin Indonesia, perlu adanya kategorisasi atau pengelompokan sederhana. Hal ini penting, karena pertumbuhan konservatisme Islam tidak seragam sama sekali, baik dalam ekspresi keislaman, maupun sosial, budaya, dan politik. Ada dua kelompok besar dalam Islam Konservatif yang bersifat Fundamentalis. *Pertama*, peningkatan amal ibadah atau ritual sejak dari yang wajib sampai sunah yang merupakan gejala yang diekspresikan mayoritas kaum Muslimin Indonesia. Gejala ini terlihat dalam peningkatan jumlah jamaah masjid (dengan jumlah masjid yang juga terus bertambah), jamaah haji dengan masa tunggu yang makin lama dan umrah serta berbagai bentuk ibadah lain, misalnya shalat Dhuha di tempat kerja dan sebagainya. Gaya ini dibarengi dengan adopsi gaya hidup yang dianggap lebih Islami, semisal berhijab, celana cingkrang, dan berjenggot panjang, dll.

Kedua, kebangkitan konservatisme di kalangan kaum muslim Indonesia secara lebih ketat. Kelompok ini juga sebenarnya memiliki subkelompok yang sedikit berbeda satu sama lain dalam tingkat keketatan pada apa yang dipandang sebagai pemahaman dan praktik Islam yang lebih benar. Umumnya, terdapat kecenderungan kuat kelompok ini untuk mengorientasikan kehidupan keislaman mereka pada tradisi pada masa pasca-Nabi Muhammad atau pada sahabat atau thabi'in. Bagi mereka, Islam yang dipahami dan dipraktikkan mereka inilah yang paling sempurna dan paling murni—dan oleh karena itu menjadi sumber rujukan dan ikutan. Oleh sebab itu, mereka 'hijrah'—pindah dari kehidupan sekarang kepada pemahaman dan praktik Islam lebih ketat. Namun, rujukan pada pemahaman dan praktik Islam generasi awal ini juga berbeda di antara sub-sub kelompok yang ada. Ada yang merujuk secara sedikit lebih longgar, tapi juga ada yang mengacu secara sangat literal dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Karena itu, kelompok konservatif ini menolak realitas dan gejala modern atau modernisme tertentu, seperti gaya hidup, sosialbudaya, sampai politik. Bagi mereka, tema-tema modern, seperti kesetaraan gender, HAM, demokrasi, dan semacamnya tidak kompatibel, dan karena itu harus ditolak (Azra 2020).

Kelompok pertama sering dipahami sebagai tingkat konservatif yang masih rendah, dalam artian mereka hanya sampai pada menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Fenomena hijrah juga bisa masuk pada bagian. Pendakwahnya bisa Teuku Wisnu, dan kawan-kawan artis yang tergabung dalam Hijrah Squad. Sementara kelompok kedua, lebih besar lagi cakupannya, karena mereka pun dipecah lagi dengan beberapa subkelompok yang saling berseberangan, seperti Khalid Basalamah yang berseberangan dengan Firanda.

Ada beberapa kelompok yang mau menerima pemerintah seperti Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah, Badrussalam, dan Subhan Bawazier. Ada pula yang tidak begitu menerima pemerintah dan cenderung menuntun penerapan syariah, seperti Firanda, Yazid Jawaz, Abdul Hakim bin Amir Abdat, Muhammad Abdul Tuasikal, dan lain-lain. Ada pula kelompok yang sebenarnya penerimaan mereka terhadap tradisi Islamnya cenderung semi-sinkretis, namun dalam berdakwah menggunakan cara-cara yang kolot, seperti Habib Rizieq Syihab dan FPI-nya. Mereka termasuk yang kontra dengan rezim.

Kesimpulan

Islam Liberal di Indonesia digawangi oleh tokoh-tokoh Jaringan Islam Liberal. Liberalisme Islam di Indonesia mempunyai empat corak, yaitu corak progresif, radikal, moderat, dan alternatif. Tokoh-tokoh liberal, ada Ulil Absar Abdallah, Nong Darul Mahmada, Danny J.A., Muhammad Alfayyad, Rashid Murtadlo, Syarifah Sabaroedin, Ahmad Sahal, Lutfie Asysyaikanie, Hamid Basyaib, dan masih banyak lagi. Sedangkan dua tokoh yang selalu dikutib oleh mereka sebagai rujukan pemikiran adalah Nurcholis Majid dan Gus Dur, walau keduanya tidak pernah menyebut diri mereka liberal.

Kaum konservatisme Indonesia dibagi jadi dua corak umum, yaitu kelompok yang mengalami peningkatan amal ibadah atau ritual sejak dari yang wajib sampai sunah yang merupakan gejala yang diekspresikan mayoritas kaum Muslimin Indonesia. Kedua, kelompok yang mengalami kebangkitan konservatisme di kalangan kaum muslim Indonesia secara lebih ketat. Kelompok yang kedua ini, mempunyai subkelompok yang banyak dan berbeda-beda.

Ada kelompok yang berafiliasi yang cenderung kooperatif dengan pemerintah seperti Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah, Badrussalam, dan Subhan Bawazier. Ada pula yang tidak begitu menerima pemerintah dan cenderung menuntun penerapan syariah, seperti Firanda, Yazid Jawaz, Abdul Hakim bin Amir Abdat, Muhammad Abduh Tuasikal, Felix Siauw dan lain-lain. Ada pula kelompok yang sebenarnya penerimaan mereka terhadap tradisi Islamnya cenderung semi-sinkretis, namun dalam berdakwah menggunakan cara-cara yang kolot, seperti Habib Rizieq Syihab dan FPI-nya. Mereka termasuk yang kontra dengan rezim.

BIBLIOGRAFI

- Abdalla, Ulil Abshar. 2002a. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam - JIL Edisi Indonesia." 2002. <https://ahmad.web.id/sites/islamlib/menyegarkan-kembali-pemahaman-islam.htm>.
- . 2002b. "Metode Pemahaman Islam Liberal." Dalam . Jakarta.
- Abdalla, Ulil Abshar, dan kawan-kawan. 2003. *Islam Liberal Dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: el.SAQ.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2004. *Wajah Baru Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Fayyadl, Muhammad. 2015. "Apa Itu Islam Progresif?" *Islam Bergerak* (blog). 10 Juli 2015. <https://islambergerak.com/2015/07/apa-itu-islam-progresif/>.
- Al-Jawi, M. Shidqi. t.t. "Akar Sejarah Pemikiran Liberal."
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Azra, Azyumardi. 2020. "Konservatisme Agama di Indonesia: Fenomena Religio-Sosial, Kultural, dan Politik (1) - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website." 19 November 2020. <https://www.uinjkt.ac.id/konservatisme-agama-di-indonesia-fenomena-religio-sosial-kultural-dan-politik-1/>.
- Barton, Greg. 2006. *Biografi Gusdur: the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. 7 ed. Yogyakarta: LKiS.
- Batubara, Ulfah Nury, Royhanun Siregar, dan Nabilah Siregar. 2021. "LIBERALISME JOHN LOCKE DAN PENGARUHNYA DALAM TATANAN KEHIDUPAN." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9 (4): 485–91. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3189>.
- Blackburn, Simon. 1996. *Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Bruinessen, Martin Van. 2013. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Chartier, Roger. 2004. "Languages, Books, and Reading from the Printed Word to the Digital Text." *Critical Inquiry* 31 (1): 133–52. <https://doi.org/10.1086/427305>.
- Coady, C. A. J. 1995. *Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishing.

- Doe, Hidayat. 2011. "Konservatif, Revolusioner, dan Reformatif." KOMPASIANA. 22 September 2011. <https://www.kompasiana.com/sangia/550b2999813311c615b1e3a8/konservatif-revolusioner-dan-reformatif>.
- Farisa, Fitria Chusna. 2020. "FPI Resmi Dibubarkan, Penggunaan Simbol hingga Atribut Dilarang." KOMPAS.com. 30 Desember 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13533731/fpi-resmi-dibubarkan-penggunaan-simbol-hingga-atribut-dilarang>.
- Gier, Nicholas F. 1980. "Religious Liberalism and The Founding Fathers", dalam Peter Caws, ed. *Two Centuries of Philosophy in America*. Oxford: Basil Blackwell Publishers.
- Hamsah, Muhammad, dan Nurchamidah Nurchamidah. 2019. "PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF NEO-MODERNISME (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5 (2, Sept): 150–75. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.118.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. 2002. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Isani Press.
- "Lema 'Konservatif' - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia." t.t. Diakses 4 Juni 2023. <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/konservatif>.
- Masgono. 2010. "Liberalisme: Dari Ideologi Menjadi Teologi." *INSISTS* (blog). 14 April 2010. <https://insists.id/liberalisme-dari-ideologi-menjadi-teologi/>.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nata, Abuddin. 2001. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 155*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Noer, Deliar. 1991. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Qodir, Zully. 2012. *Islam Liberal, Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LKiS.
- Qodir, Zuly. 2007. *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Budhy Munawar. 2010. *Sekularisme, Liberalisme Dan Pluralisme*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmat, Rahmat. 2016. "Liberalisme Dalam Pendidikan Islam (Implikasinya Terhadap Sistem Pembelajaran Agama Islam Di Sekolah)." *Nidhomul Haq* :

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1 (2): 70–88.
<https://doi.org/10.31538/ndh.v1i2.10>.

Sukarna. 1981. *Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumi.

Suminto, Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Syamsi, Badarus. 2014. “PERBEDAAN CORAK PEMAHAMAN AGAMA ANTARA FUNDAMENTALISME DAN LIBERALISME SERTA DAMPAKNYA BAGI TIMBULNYA KONFLIK KEAGAMAAN.” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14 (1): 73–92. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.120>.

Tim Penyusun. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. 9. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

Tim Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Wahid, Din. 2014. “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia.” *Studia Islamika* 21 (2): 375–90. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1043>.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2016. “Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis | TSAQAFAH,” Mei. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/145>.

Ziyadah, Mu’in. 1988. *Al Mawsû’ah al Falsafiyah al Arabiyah*. Vol. 21. Mesir: Maktabah Mukmin Qurasih.